



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Jalan Cimuncang No. 21D, Padasuka, Kecamatan Cibeunying Kidul
Kota Bandung, Jawa Barat 40125, www.pt-bandung.go.id, info @pt-bandung.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU KE I
PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

Telah dilakukan reviu ke -I atas Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Bandung tahun 2025 sebagai tindaklanjut terhadap hasil evaluasi capaian kinerja Triwulan III Tahun 2025 serta penetapan Renstra dan IKU 2025-2029 Mahkamah Agung RI, hal tersebut merupakan dalam upaya perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja untuk mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik, substansi yang dimuat dalam perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Bandung menjadi tanggung jawab pengampu pada Pengadilan Tinggi Bandung.

Informasi perubahan data yang termuat dalam Perjanjian Kinerja dapat digunakan dalam penyusunan dokumen terkait lainnya setelah memperoleh persetujuan dari Ketua Pengadilan Tinggi Bandung.

NO	Perubahan		
	Semula	Menjadi	Alasan Perubahan
1.	Sasaran Kinerja Pengadilan Tinggi Bandung terdiri atas dua sasaran kinerja	Sasaran kinerja Pengadilan Tinggi Bandung menjadi tiga sasaran kinerja	Penetapan Renstra dan IKU Mahkamah Agung 2025-2029
2.	Indikator Kinerja pada Pengadilan Tinggi Bandung terdiri dari Empat indikator kinerja	Indikator Kinerja Pada Pengadilan Tinggi Bandung menjadi 10 Indikator Kinerja.	Penetapan Renstra dan IKU Mahkamah Agung 2025-2029
3.	Penetapan target hanya untuk empat indikator kinerja.	Penetapan kemebali target sepuluh indikator kinerja	Penetapan Renstra dan IKU Mahkamah Agung 2025-2029
4.	Anggaran DIPA 01 Rp. 43.573.635.000,-	Anggaran DIPA 01 Rp. 51.371.815.000,-	Evisiensi dan Optimalisasi serta penarikan dana oleh Mahkamah Agung RI
	Anggaran DIPA 03 Rp. 731.615.000	Anggaran DIPA 03 Rp. 478.884.000,-	

5.	Pimpinan Pengadilan Tinggi Bandung semula Moh Eka Kartika EM.	pimpinan pengadilan tinggi bandung menjadi Syahlan.	Ketua Pengadilan Tinggi Bandung memasuki masa Purnabakti
----	---	--	--

Berdasarkan hasil reviu diatas, Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bandung tahun 2025-2029 sudah relevan untuk digunakan sebagai tolak ukur pencapaian kinerja pada Lima Tahun mendatang.

Bandung, 17 November 2025
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, 


SYAHLAN

REVIU KE I
RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI BANDUNG
TAHUN 2025-2025

Reviu Ke-I. Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bandung direviu menyelaraskan denga Renstra Mahkamah Agung RI tahun 2025 – 2029 sesuai dengan SK KMA Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 Tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029, serta SK Sesma Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029

NO	Koreksi/Perubahan	Halaman
1.	Perubahan Pimpinan Pengadilan Tinggi Bandung	2,3,4,6
2.	Perubahan Sasaran Kinerja, Indikator Kinerja dan Target Indikator Kinerja pada Pengadilan Tinggi Bandung	5,6

Bandung, 17 November 2025
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, 



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI BANDUNG**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. SYAHLAN, S.H., M.H.**

Jabatan : Wakil Ketua

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama.**

Nama : **H. Bambang Myanto, S.H., M.H.**

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

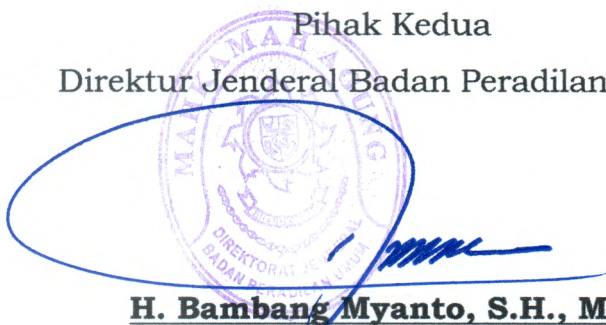
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

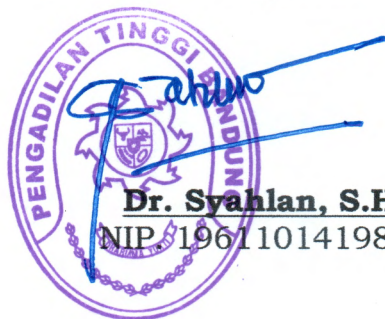
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum


H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

Bandung, 17 November 2025

Pihak Pertama,

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung


Dr. Syahlan, S.H., M.H.
NIP. 196110141982031003

REVIU KE - I
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.
PENGADILAN TINGGI BANDUNG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntable, responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu. a. Perkara Perdata b. Perkara Pidana c. Perkara Tipikor	100% 100% 100%
		1.2	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada pengadilan pengaju. a. Perkara Perdata b. Perkara Pidana c. Perkara Tipikor	100% 100% 100%
		1.3	Persentase putusan pengadilan yang di unggah pada direktori putusan.	90.11%
		1.4	Persentase Perkara Perdata Pada Tingkat Banding Yang Mengajukan E-Court	97.25%
		1.5	Persentase Perkara Pidana Pada Tingkat Banding Yang Menggunakan E-Berpadu a. Perkara Pidana dan Pidana Anak b. Perkara TIPIKOR.	89.80%
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik.	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	3.80
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil negara (IP-ASN) satuan kerja pengadilan.	80
		3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan	93
		3.3	Nilai kinerja perencanaan anggaran.	75
		3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3

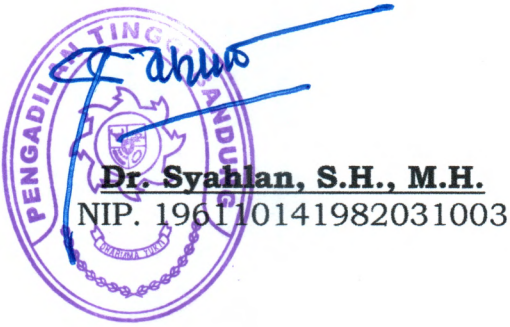
No	Kegiatan	Anggaran
1.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 51.371.815.000,00 (Lima puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 478.884.000,00 (Empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu)

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum



H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

Pihak Pertama,
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung



Dr. Syahlan, S.H., M.H.
NIP. 196110141982031003